

**KOALISI PARTAI ISLAM DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH MESUJI TAHUN 2017**

(STUDI TENTANG STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

**DWI GUSTINA WATI
NPM. 1431040052**

Jurusan Pemikiran Politik Islam

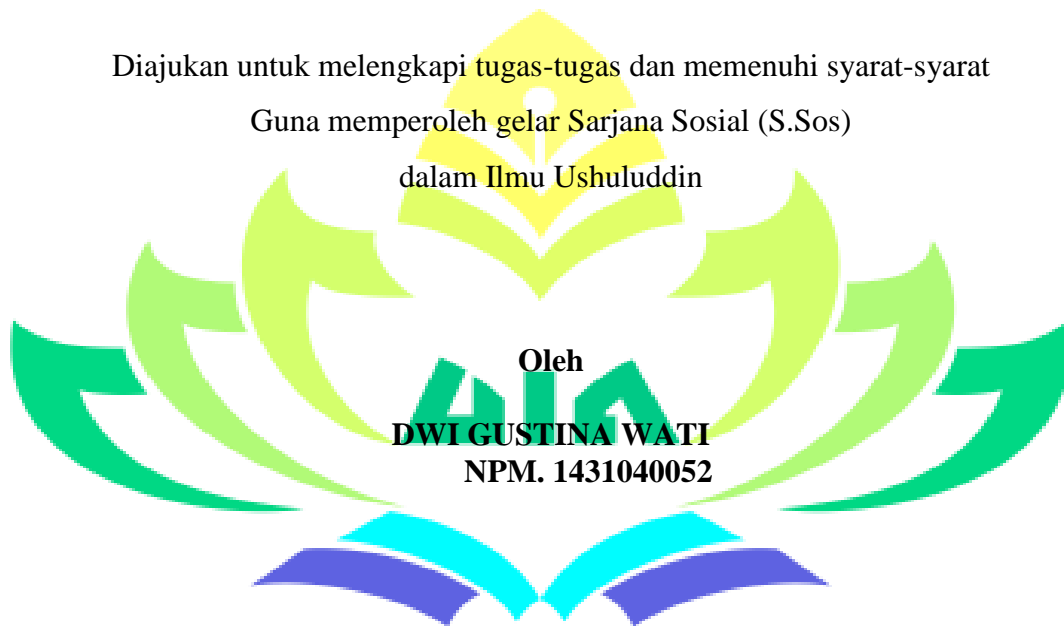
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**KOALISI PARTAI ISLAM DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH MESUJI TAHUN 2017**

(STUDI TENTANG STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh
DWI GUSTINA WATI
NPM. 1431040052

Jurusan Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I: Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc.,M.A

Pembimbing II: Dr. Nadirsah Hawari, M.A

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

KOALISI PARTAI ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MESUJI TAHUN 2017 (STUDI TENTANG STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

Oleh

Dwi Gustina Wati
1431040052

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pasangan Khamami dan Saply pada pemilihan kepala daerah Mesuji tahun 2017. Bagaimana strategi PKS dalam memperjuangkan pasangan Khamami dan Saply dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017? Pertanyaan ini perlu dilakukan penelitian karena masyarakat melihat sosok calon yang memiliki kharisma. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*" yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan secara nyata yang berada di lingkungan masyarakat dan bersifat deskriptif dengan cara analisis kualitatif dan cara berfikir induktif yaitu berasal dari fakta khusus lalu dijabarkan menjadi umum. Subjek penelitiannya adalah Partai Keadilan Sejahtera Mesuji, sedangkan objek penelitiannya adalah strategi Partai Keadilan Sejahtera pada pemegang bupati Mesuji tahun 2017. Pengumpulan data dokumentasi merupakan data yang berupa surat tertulis, arsip-arsip dan buku-buku mengenai argumentasi, teori dalil yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara adalah dialog, Tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pasangan Khamami-Saply dan mengetahui strategi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pasangan calon Khamami-Saply yang didukung pada pemilihan kepala daerah Mesuji tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya strategi yang diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera terhadap pemegang bupati Mesuji. Bentuk dukungan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan kepala daerah Mesuji 2017 dengan cara partai keadilan sejahtera memberikan dukungan penuh terhadap Khamami-Saply, sosialisasi, pengarahan kader dan Penjagaan suara. Hal ini diharapkan agar Khamami-Saply bisa memenangkan pilkada Mesuji tahun 2017. Strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan kepala daerah Mesuji 2017 sebelum pemilihan dengan cara mengoptimalkan kampanye langsung kepada masyarakat dengan cara *door to door* untuk menjelaskan visi misi dari pasangan yang didukung, saat pilkada berlangsung Partai Keadilan Sejahtera melakukan konsolidasi internal, konsolidasi dengan partai pendukung dan sosialisasi kepada pemilih Partai Keadilan Sejahtera dan setelah pilkada Partai Keadilan Sejahtera mengawal pemerintahan bupati terpilih dengan memberikan masukan dan saran terkait kebijakan pemerintah daerah.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dwi Gustina Wati

NPM : 1431040052

Program Study : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 (Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera)”** adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan ruhukan didalamnya. Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 03 Mei 2019
Yang menyatakan,

Dwi Gustina Wati
NPM : 1431040052

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koalisi Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017
(Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera)

Nama : Dwi Gustina Wati

NPM : 1431040052

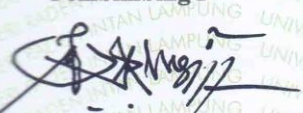
Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I**Pembimbing II**




Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc.M.Ag
NIP.195808231993031001



Dr. Nadirsa Hawari, M.A
NIP.197406282008011013

Mengetahui
Ketua Jurusan



Dr. Nadirsa Hawari, M.A
NIP. 197406282008011013

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Al. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **KOALISI PARTAI ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MESUJI TAHUN 2017 (STUDI TENTANG STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)**, Disusun oleh: **Dwi Gustina Wati, NPM: 1431040052**, Jurusan: **Pemikiran Politik Islam, (PPI)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddindan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada hari Senin, **22 April 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Himyari Yusuf, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Angga Natalia, M.I.P	(.....)
Penguji Utama	: Abdul Qohar, M. Si	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A	(.....)

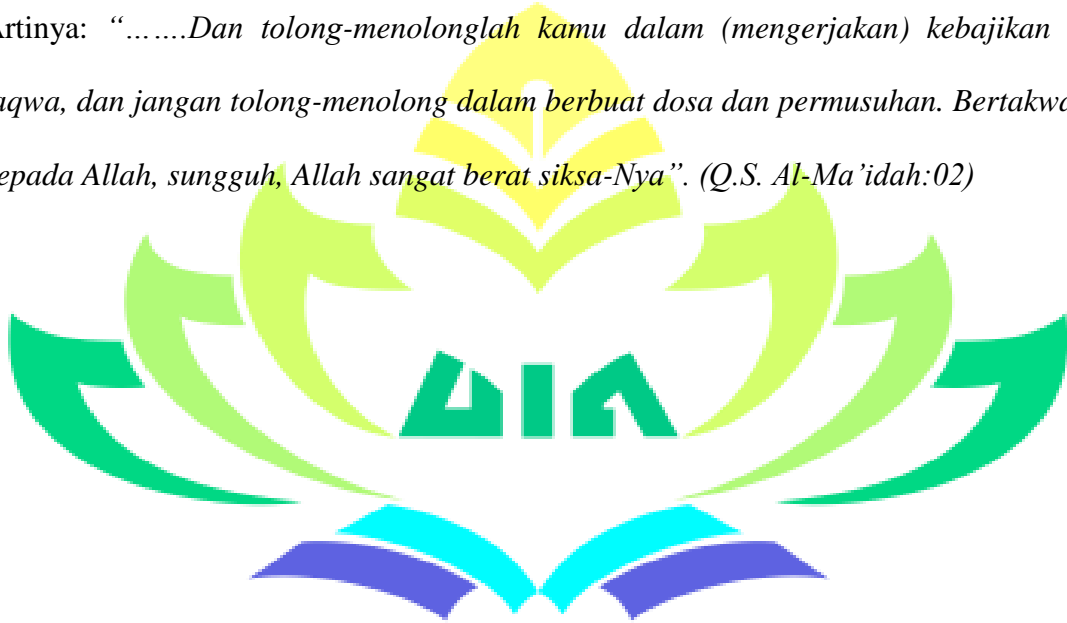
Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama


Dr.H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag
NIP. 19580823199303001

MOTTO

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Ma'idah:02)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama penulis menuntut ilmu:

1. Kedua orangtuaku tercinta, ayahanda Parjo dan Ibu Siti yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi, dukungan dan yang tiada henti-hentinya mendoakanku dan menentun langkahku hingga tercapainya cita-citaku.
2. Kakakku Supriyanto, Adikku Iip Natulia dan Windari Pujiati yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan do'a yang tulus kepadaku.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku PPI kelas A dan B yang selalu menyemangati satu sama lainnya selama penulis menempuh pendidikan dan belajar bersama sahabat-sahabat semuanya. Serta untuk adik-adik tingkat yang memberikan motivasi dan senyum semangatnya.
4. Buat sahabat-sahabatku Dwi Surtianingsih, Selvi Damayanti dan semuanya yang berada di Kos Al-Husna Putri yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini.
5. Untuk kelurga besar PSHT komisariat UIN Raden Intan Lampung yang memberikan motivasi dan senyum semangat .
6. Terimakasih untuk kelurga besar UKM Pramuka UIN Raden Intan Lampung yang memberikan subangsih ilmu dan motivasi kepada penulis.
7. Sahabat seperjuangan KKN kelompok 235 Desa Banyumas, Kec. Banyumas, Kab. Pringsewu, terimakasih atas semua kerjasama kita dalam menjalankan tugas dari kampus tercinta.

8. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma. Lc, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A selaku pembimbing 2 yang telah dengan susah payah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa dilupakan.



RIWAYAT HIDUP

Nama Dwi Gustina Wati, di lahirkan di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1995 putri ke 2 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Parjo dan Ibu Siti. Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 03 Baosan Lor pada tahun 2002 selama 6 tahun menempuh pendidikan di Sekolah Dasar dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tepatnya di SMP Negeri 2 Ngrayun selama 3 tahun menempuh pendidikan dan selesai pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, tepatnya di SMA Negeri 1 Simpang Pematang selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 alhamdulillah penulis diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan Ridho dan karunia-Nya terhadap ciptaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, ummatnya yang taat pada ajaran agama-Nya.

Selesainya penulisan skripsi ini yang berjudul “Koalisi Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 (Studi Strategi Partai Keadilan Sejahtera)” adalah berkat dari pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadi jalan penulis untuk dapat mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tersusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A sebagai Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam, sekaligus sebagai pembimbing II yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran serta memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Tin Amalia Fitri, S. Sos, M.Si sebagai sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan pengarahan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, khususnya Jurusan Pemikiran Politik Islam.
6. Para karyawan dan tenaga administrasi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama atas diperkenankannya penulis meminjam literature yang dibutuhkan.
8. Bapak Maulani selaku ketua DPD PKS Mesuji dan Jajarannya yang mengizinkan penulis untuk melakukan meneliti di DPD PKS Mesuji.
9. Bapak H. Agus Kurniawan, S.T. Sebagai Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW PKS Lampung yang turut memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di DPW PKS Lampung.
10. Berbagai rekan yang turut membantu skripsi ini.

Demikianlah semoga skripsi ini bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa menambah wawasan bagi yang membacanya. Amin Ya Robbal'Alamin.

Bandar Lampung,
Penulis,

Dwi Gustina Wati
NPM.1431040052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Tinjauan Pustaka	13
BAB II KOALISI PARTAI POLITIK ISLAM DAN PILKADA	
A. Partai Politik	16
1. Pengertian Partai Politik.....	17
2. Sejarah Lahirnya Partai Politik.....	17
B. Koalisi Partai Politik	27
1. Pengertian Koalisi Partai Politik.....	28
2. Bentuk Koalisi Partai Politik.....	29
C. Pemilihan Kepala Daerah	30
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	34
2. Landasan Yuridis.....	35
BAB III MESUJI DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	
A. Sejarah Kabupaten Mesuji.....	36
1. Kondisi Geografis dan Topografi.....	40
2. Luas Wilayah dan Demografi	45
B. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	46
1. Sejarah Berdirinya DPD PKS Mesuji.....	46
2. Struktur organisasi DPD PKS Mesuji.....	46

**BAB IV STRATEGI PKS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017**

A. Bentuk Kerjasama Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dengan Kamami-Saply	69
1. Dukungan Politik.....	72
2. Sosialisasi.....	73
B. Strategi Partai Keadilan Sejahtera(PKS)Untuk Pasangan	
Khamami-Saply.....	74
1. Strategi Pra Pilkada.....	79
2. Strategi Saat Pilkada.....	78
3. Strategi Pasca Pilkada.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel I : Anggota DPR Kabupaten Mesuji Partai PKS
- Tabel II : Anggota DPR Kabupaten Mesuji Partai PKB
- Tabel III : Anggota DPR Kabupaten Mesuji Partai PAN
- Tabel IV : Daftar Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Mesuji
- Tabel V : Jumlah Penduduk Per Kecamatan
- Tabel VI : Jumlah Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji
- Tabel VII : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- Table VIII : Jumlah SD, SMP, SMA menurut Kecamatan tahun 2016



DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Lampiran I : Surat Keterangan Keaslian
- Daftar Lampiran II : Surat Konsultasi
- Daftar Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Daftar Lampiran IV : Daftar Nama Responden dan Daftar Nama Informan
- Daftar Lampiran V : Daftar Dokumentasi Responden dan Informan
- Daftar Lampiran VI : AD/ART PKS
- Daftar Lampiran VII : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKS Tentang Calon
Bupati
dan/atau Bupati Mesuji Periode 2017-2022 PKS
- Daftar Lampiran VIII : Surat Pengurus Daerah PKS Kabupaten Mesuji Tentang
Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Mesuji 2016
- Daftar Lampiran IX : Surat Keputusan Judul Skripsi
- Daftar Lampiran X : Surat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung
- Daftar Lampiran XI : Surat Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi
Lampung
- Daftar Lampiran XII : Surat Penelitian dari DPW PKS Lampung

Pedoman Wawancara Untuk Responden

1. Alasan apa yang membuat PKS mengukung pasangan Khamami-Saply dalam pilkada Mesuji 2017?
2. Kapan terjadinya koalisi PKS dengan pasangan Khamami-Saply?
3. Bagaimana bentuk dukungan Partai Keadilan Sejahtera terhadap pasangan Khamami-Saply?
4. Strategi apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pasangan Khamami-Saply?



Pedoman Wawancara Untuk Informan

1. Apakah anda kenal dengan Partai Keadilan Sejahtera?
2. Pengaruh apa saja yang anda rasakan dari Partai Keadilan Sejahtera?
3. Apakah Partai Keadilan Sejahtera pernah melaksanakan kegiatan tentang pilkada?
4. Apakah menurut anda kegiatan PKS ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Daftar Nama Responden

No	Nama	Kedudukan
1	Agus Kurniawan	Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW PKS Lampung
2	Maulani	Ketua DPD PKS Mesuji
3	Adri Ubaidilah	Sekretaris Umum DPD PKS Mesuji
4	Hariyato	Ketua Bidang Kaderisasi
5	Edi Sandani	Ketua Bidang Politik, hukum dan keamanan

Daftar Nama Informan

No	Nama	Kedudukan
1	Ansori	Masyarakat
2	David	Masyarakat

BAB I PEDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah Koalisi Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 (Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera). Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan isi judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

Koalisi adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen.¹ Koalisi dibangun berdasarkan landasan untuk dukungan semakin besar peluang untuk menang dalam pemilihan.

Greg Fealy berpendapat bahwa partai Islam dibagi kedalam beberapa bentuk yaitu: memenagkan kandidat yang diusung. Melakukan koalisi dengan banyak partai diharapkan sumber dukungan terhadap calon akan besar.²

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh penduduk daerah yang memenuhi syarat dalam pemilihan. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Mesuji adalah kabupaten baru di Lampung, pemekaran Kabupaten Tulang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://jagokata.com/arti-kata/koalisi.html> diakses pada tanggal 03 Juli 2018 Pukul: 10.30)

² M. Nursalim Malay, *Sikap Partai Politik Dalam Perubahan UU Pemilu*, Jurnal Tapis.

Bawang. Dasar hukum Kabupaten Mesuji adalah UU RI No. 49 Tahun 2008. Ibu kota Kabupaten Mesuji adalah Wiralaga Mulya. Nama Wiralaga Mulya diambil dari penggabungan dua kampung di Kecamatan Mesuji yaitu Kampung Wiralaga dan Kampung Sidomulya yang merupakan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tetua Mesuji. Mesuji terdiri dari 7 kecamatan dan 105 desa. Wilayah Kabupaten Mesuji merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian.³

Kesimpulan penegasan judul di atas, adalah suatu penelitian yang membahas tentang pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten yang diselenggarakan pada tahun 2017 dan diikuti oleh 2 orang kandidat pilkada mesuji 2017. Partai yang berkoalisi dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Mesuji adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional-Demokrasi (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasusnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul skripsi adalah:

1. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 Partai Keadilan Sejahtera bagian dari koalisi partai yang mendukung pasangan Khamami-Saply, karena Partai

³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mesuji diakses pada tanggal 05 Januari 2019 Pukul 11.30 WIB

Keadilan Sejahtera memiliki basis jaringan yang cukup kuat dan kader yang militan. Sehingga Partai Keadilan Sejahtera memiliki kekuatan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

2. Judul yang dibahas sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dianalisa melalui pendekatan ilmiah dan mengarah pada hasil yang sempurna serta penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan kepada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, amanah dan musyawarah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial.

Koalisi merupakan aktivitas politik yang kerap terjadi di negara dengan sistem multipartai karena hasil pemilu kerap menunjukkan kekurangan suara yang tidak mampu memenuhi suara mayoritas untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri. Dampaknya perlu ada koalisi partai politik untuk membentuk pemerintahan dan juga koalisi di parlemen dalam hal pengambilan keputusan tertentu. Alasan partai politik berkoalisi adalah perolehan suara yang didukung lebih banyak, partai politik yang berkoalisi mendapatkan kursi di pemerintahan, partai politiknya lebih terkenal dimasyarakat.

Partai Islam dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu sebagai partai islam yang berbasas dan formal. Kedua, partai yang memperjuangkan nilai islam disbanding simbol islam. Kedua jenis tersebut mempunyai pendekatan yang berbeda dalam memahami agama islam dan memiliki perbedaan orientasi dan program.⁴

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD, dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan Gubernur (Pilgub) langsung sebagai bentuk amanat normatif atas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dan partisipatif, telah diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota. Melalui Undang-Undang di atas menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang juga mulai diwarnai dengan keberadaan bendera partai politik yang berbeda-beda sebagai imbas dari adanya demokrasi.

Pemilihan umum Bupati Mesuji tahun 2017 merupakan pemilihan kepala daerah tingkat II di Kabupaten Mesuji. Pemilihan umum ini merupakan bagian dari pemilihan umum kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017 untuk periode 2017-2022.

⁴ Thoyib dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 23.

Terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar pada pemilihan Bupati Mesuji 2017 yaitu:

1. Khamami dan Saply yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
2. Febriana Lesisie Tantina dan M.Adam Ishak yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani (Hanura).

Pemilihan umum Kabupaten Mesuji 2017 dimenangkan oleh pasangan Khamami-Saply. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 106.975 orang berpartisipasi dalam pemilihan umum ini, dari total 145.387 pengguna hak pilih terdaftar.

Lahirnya partai politik tidak lepas dari kenyataan bahwa rakyat harus diikuti sertakan dalam setiap proses politik.⁵ Kecenderungan umum dalam pemilihan kepala daerah langsung adalah terbentuknya koalisi partai-partai politik untuk mengusung kandidat. Tujuan partai politik melakukan koalisi adalah untuk mendapatkan suara yang lebih banyak, untuk memperoleh kursi parlemen, partai politiknya lebih terkenal di masyarakat.

Tujuan yang pertama dan terutama dari masing-masing partai politik adalah agar unggul atas yang lain untuk bisa mencapai kekuasaan atau mempertahankannya.⁶ Banyaknya keinginan masyarakat Islam di Indonesia menyebabkan munculnya partai

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2010), h. 397.

⁶ Ramlan Suebakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Graesido, 2010), h. 76

Islam. Partai politik Islam di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji menetapkan anggota DPRD Kabupaten Mesuji 2014-2019. Berikut ini anggota DPRD Kabupaten Mesuji Periode 2014-2019 pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tabel 1
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai PKS

No	Nama	Suara
1.	Eddy Sandani, Spd	511
2.	Maulani	1061

Tabel 2
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai PKB

No	Nama	Suara
1.	Yuliani Rahmi Safitri	322

Tabel 3
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai PAN

No	Nama	Suara
1.	Agus Setyo, SE	755
2.	Supriyanto	1691
3.	Nuryadi Haryono	785
4.	Mat Nur	3128

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pasangan Khamami-Saply ?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pasangan calon Khamami-Saply?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui bentuk dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pasangan Khamami-Saply.
2. Mengetahui strategi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pasangan calon Khamami-Saply.

F. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu politik dalam hal studi koalisi partai Islam dalam Pilkada Mesuji Tahun 2017. Koalisi partai politik dalam suatu pemilihan umum ataupun pilkada seperti pilkada misalnya memiliki dua motif yang berbeda antara lain yaitu koalisi yang sifatnya ideologis dengan mengedepankan persamaan ideologi dan juga koalisi yang sifatnya pragmatis dengan mengedepankan persamaan tujuan antarpantai.
 - b. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan tentang bagaimana menganalisis secara mendalam koalisi partai Islam dalam pilkada.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain guna menambah teori, peningkatan wawasan dan pola pikir yang dibutuhkan khususnya dibidang informasi yang berkaitan dalam Koalisi Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang.
 - b. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan metode yang dilakukan dalam penelitian dengan cara yang sistematis.⁷

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*". Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi berpendapat bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk melihat secara jelas mengenai situasi saat ini dan komunikasi anatar kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.⁸ Proses penelitian ini membahas tentang data dan masalah yang berada di lapangan yang berhubungan dengan strategi Partai Keadilan Sejahtera. Dengan mengusung judul koalisi partai Islam dalam pemilihan Kepala Daerah di Mesuji tahun 2017 (studi kasus strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi obyektif di lapangan.⁹ Jadi penelitian ini menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat.

⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 20

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara , 1997), h. 46.

⁹ Prastya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan pers, 1999), h. 60

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu tentang Koalisi Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji tahun 2017 (studi tentang strategi Partai Keadilan Sejahtera).

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Abdurrahman Fathoni data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dari sumber pertama.¹⁰ Sumber data primer merupakan data yang penting dari penelitian, yang didapatkan dari *interview* atau wawancara. Dalam hal ini penulis menjadikan ketua bidang pembinaan kader DPW PKS Lampung (Agus Kurniawan), ketua DPD PKS Mesuji (Maulani), Sekretaris Umum PKS Mesuji (Adri Ubaidillah), ketua bidang pemenangan pemilu dan pilkada PKS Mesuji (Edi Sandani), dan ketua bidang kaderisasi PKS Mesuji (Hariyanto) sebagai sumber dalam mendapatkan data dan dokumen yang berupa AD/ART partai, Platform, dokumentasi kegiatan, dan hal lain yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berisi kejadian atau jaraknya yang jauh dari data asli.¹¹ Atau data yang sudah terpublikasikan dari lembaga yang mengelolanya. Data sekunder merupakan data yang melengkapi dari data primer, yang berguna untuk

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta), h. 38

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-7, h. 50

memperkuat data primer, yang diperoleh dari buku-buku, literature seperti buku tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Data primer dan data sekunder bertujuan untuk melengkapi, karena data yang dilapangan kurang sempurna kalau tidak ditunjang dari data kepustakaan. Kedua data tersebut dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Metode Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian, penulis menggunakan 2 metode yaitu:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.¹² *Interview* atau kuisisioner lisan merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari responden. Penulis menggunakan *interview* terpimpin, *interview* yang digunakan oleh pewawancara dan membawa pertanyaan yang lengkap sesuai dengan data yang dibutuhkan.¹³

Interview ada dua jenis, yaitu pertama responden dan yang kedua informan. Responden yaitu sumber informasi utama untuk peneliti, sedangkan informan yaitu sumber data untuk melengkapi data dari responden.¹⁴

¹²M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), h. 81.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 145-146.

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Op. Cit*, h. 105.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Maulani selaku ketua DPD PKS Mesuji, Adri Ubaidillah selaku sekretaris umum dan Edi Sandani selaku ketua bidang pemenangan pemilu dan pilkada, dan sebagian masyarakat di Mesuji.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.¹⁵ Metode dokumentasi dipakai sebagai metode pelengkap dari metode interview atau wawancara. Metode dokumentasi yaitu sumber data yang berisi tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa tulisan ataupun foto-foto yang dibutuhkan.

4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul sesuai dengan yang diperlukan lalu disusun sebagai laporan. Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisa kualitatif diuraikan dengan kata-kata ataupun kalimat lalu dipisahkan sesuai dengan kategori untuk mendapatkan kesimpulan.¹⁶ Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berasal dari fakta-fakta yang nyata lalu disimpulkan secara khusus.¹⁷

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981), h. 93.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM, 1993), h. 132

¹⁷ Nana Sujana, *Karya Ilmiah, Makalah Skripsi, Tesis, Desertasi*, (Semarang: Sinar Baru, 1987), h.

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif untuk menapatkan kesimpulan akhir. Berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang nyata lalu disimpulkan menjaadi sifat umum.¹⁸

H. Tinjauan Pustaka

Sejauh penegetahuan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang serupadengan judul skripsi ini yaitu tentang strategi, idealisme serta rekrutmen. Artinya dengan tinjauan pustaka seorang peneliti bisa mengetahui secara nyata, walaupun secara garis besar, tentang penelitian dan cara yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁹

1. Skripsi karya Diana Febriandra dari IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin jurusan pemikiran politik Islam 2008, yang berjudul Peran Fungsiaris Partai Keadilan Sejahtera dalam Membangun Kesadaran Politik Umat Islam di Bandar Lampung, penelitian ini berstudi kasus di DPW PKS Kota Bandar Lampung, kajian penelitian ini lebih fokus pada peranan fungsiaris PKS Kota Bandar Lampung dalam membangun kesadaran politik umat Islam dan untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung dalam membangun kesadaran politik umat Islam di Banadar Lampung.
2. Skripsi karya Tri Mahtuti dari UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin jurusan pemikiran politik Islam 2013, yang berjudul Konsistensi PKS dalam Memperjuangkan Harkat dan Martabat Perempuan,

¹⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Presss, 2002) h. 35

¹⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), cet. I, h. 236.

penelitian ini berstudi kasus di DPD PKS Lampung Utara, kajian penelitian ini lebih fokus pada kesungguhan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan dalam kiprah politik, perempuan dalam struktur politik, kiprah perempuan dalam berdakwah.

3. Skripsi karya Iranda Putri dari Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan 2014, yang berjudul Analisis Motif Koalisi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018. Pada karya ilmiah ini fokus kajiannya pada permasalahan, koalisi Partai Nasdem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung.
4. Skripsi karya Anita Deviana dari Universitas Hasanudin Makassar Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara, yang berjudul Koalisi Politik Partai Aceh dengan Partai Gerindra Menjelang Pemilu 2014. Pada karya ilmiah ini fokus kajiannya pada permasalahan, bentuk dan dampak Koalisi Politik Partai Aceh dengan Partai Gerindra.

Dari berbagai judul diatas ada persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama membahas mengenai PKS, perbedaannya adalah membahas tentang Koalisi Partai Islam dalam Pilkada Mesuji Tahun 2017 (Studi tentang startegi Partai Keadilan Sejahtera). Dengan mengkaji mengenai koalisi partai Islam dan strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada Mesuji 2017. Upaya yang bertugas dalam penelitian ini adalah ketua dari Dewan Pimpinan Daerah, serta ketua bidang pemenangan pemilu dan pilkada.

BAB II KOALISI PARTAI POLITIK ISLAM DAN PILKADA

D. Partai Politik

Kekuasaan yang merupakan sasaran utama dalam politik juga dijadikan orientasi daripada partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.²⁰

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik menurut Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2002 Pasal 1 adalah “organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum”.²¹

M. Jafar Hafisah berpendapat bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai penggambaran yang memaparkan mengenai suatu negara dan masyarakat yang dicitakan maka dari itu sangat penting untuk diperjuangkan.²²

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa partai politik adalah pada dasarnya merupakan organisasi yang dibentuk bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Partai politik dibentuk karena adanya kepentingan untuk berjuang bersama.

²⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: PT Ikrar Madiri Abadi, 2008), h. 403-404.

²¹Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1.

²² Muhammad Jafar Hafisah, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), h. 25

Definisi Partai Politik yang penulis jadikan rujukan adalah Partai Politik dalam tinjauan sistem politik Islam. Hal ini karena kajian Partai Politik dalam skripsi ini dibatasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu partai yang berasaskan Islam.

Jadi dapat ditegaskan bahwa partai politik berbeda dengan gerakan (*movment*), suatu gerakan merupakan sekelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik. Kadang-kadang, gerakan politik ini menciptakan tata masyarakat yang baru sama sekali dengan memakai cara-cara politik. Dibandingkan dengan partai politik, mereka mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan kadang-kadang bersifat ideologis. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik.

Partai politik telah menjadi ciri penting pada politik modern. Hampir dapat dipastikan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter sekalipun, dalam hal ini partai politik mengorganisasi partisipasi politik dan sistem kepartaian akan sangat mempengaruhi batas-batas sampai dimana partisipasi tersebut dapat diperluas.

2. Sejarah Lahirnya Partai Politik Dan Perkembangannya di Indonesia

Partai politik lahir di Eropa Barat. Faktor yang menyebabkan lahirnya partai politik adalah rakyat sangat penting dalam proses politik. Banyak yang beranggapan bahwa partai politik merupakan alat untuk menuju kemerdekaan seperti pada indische

partij yang merupakan salah satu partai politik pertama di Indonesia yang lahir pada tahun 1911.

Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan pelantikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta oleh PPKI, belum terbentuknya MPR dan DPR maka semua yang berkaitan dengan pemerintahan dibantu oleh KNPI (Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada tanggal 03 November 1945 keluarlah maklumat politik pemerintah No. X yang ditandatangani Moh. Hatta yang berisi tentang pemerintah mendirikan partai politik. Partai politik membuat jatuh bangunnya kabinet demi kabinet yang disebabkan karena partai politik menjadi jalan pemerintahan dan proses diparlemen.

Pemerintah kurang mengawasi partai politik sehingga partai politik menjadi organisasi yang lengkap karena semua sektor yang ada di Indonesia ada di tangan pemerintah seperti yang terjadi pada Orde Lama. Akhir Orde Lama hanya ada tiga partai politik yang berkuasa yaitu PKI, TNI AD, dan Presiden Soekarno. Sebelum tiga partai itu berkuasa ada dua partai politik yang dominan yaitu Masyumi dan PSI, akan tetapi dua partai politik tersebut dibubarkan karena ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI Pemesta.

Kemunduran Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, lahirlah demokrasi di Indonesia. Rakyat bisa menyalurkan aspirasinya melalui partai politik, pendirian partai politik dilaksanakan dengan akta notaries dan didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM.²³

²³ Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Pasal 4

3. Kedudukan Partai Politik

Menjadi negara hukum (*rechstate*) dan bukan negara kekuasaan (*machstate*) oleh karena itu hukum sebagai kedaulatan tertinggi di suatu negara. Konsep negara hukum semakin berkembang sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁴ Rakyat menyalurkan aspirasinya melalui wakil rakyat yang telah dipilih, lalu wakil rakyat menyampaikannya melalui partai politik. Oleh sebab itu rakyat memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat dalam urusan partai politik dan pemerintahan. Untuk menjalankan peran partai politik wajib ikut terlibat dalam pemilihan umum. Partai politik sangat penting di negara demokrasi.²⁵

Partai politik mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*) yang memusat yang sangat penting dalam kehidupan rakyat. Partai politik bisa disebut sebagai pilar demokrasi (ada juga yang menyebut sebagai salah satu infrastruktur politik), mereka berperan sangat penting untuk penghubung antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizen*).²⁶ UUD 1945 telah menyebutkan khususnya pada Pasal 6 A ayat (2) dan 22 E yaitu:

Pasal 6 A

(2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*²⁷

²⁴ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Op. Cit.*, h. 25

²⁵ Moh. Mahfus MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), h. 61

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 710

²⁷ Redaksi Puspa Swara, *UUD 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Puspa Swara, 2007), h. 5

Pasal 22 E

(3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*²⁸

4. Fungsi partai politik

Partai politik merupakan perantara utama yang menghubungkan kekuasaan dan ideologi-ideologi yang beredar di masyarakat dan berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat luas dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan-kebijakan publik. Fungsi partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang telah disusun berdasarkan ideologi partai politik tersebut.

Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak-hak berkomunikasi yaitu hak menyatakan pendapat, ide atau gagasan berdasar nilai-nilai yang dimiliki kelompok. Oleh sebab itu, kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik member warna tersendiri, hal ini berdasar kepada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.²⁹

Agar lebih sistematis, di bawah ini diuraikan beberapa fungsi partai politik yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain:

a. Partai Politik Untuk Sarana Sosialisasi Politik

²⁸ *Ibid*

²⁹ Rachjat Harun, Sumarno, *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. (Bandung, Mandar Maju, 2006), h. 159

Sosialisasi politik merupakan proses dari seseorang untuk mendapatkan sikap dan pandangan terhadap partai politik untuk masyarakat disekitar.³⁰ Pengertian sosialisasi politik sangat luas, pengertian yang penting adalah pendidikan politik (*political education*), sedangkan yang sangat penting disebut induktrinasi politik (*political indoctrination*).³¹ Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

b. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

c. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik berfungsi untuk koordinasi antar partai politik dengan masyarakat maupun partai politik dengan sesama partai politik bahkan partai politik dengan pemerintah.

d. Partai Politik Sebagai Sarana Pengendalian Konflik

³⁰ Miriam Budiarto, *OP. Cit*, h. 407

³¹ Abdul Mukti Fadjar, *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 19

Partai politik sebagai cara untuk mengendalikan konflik yang berada di masyarakat. Sebagai lembaga demokrasi partai politik bisa menampung dan memadukan aspirasi dan berbagai kepentingan dari pihak yang berkonflik dengan membawa permasalahan melalui musyawarah pada badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan jalan keluar melalui partai politik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai keputusan melalui kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat yang berasal dari partai politik.

Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaankebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaan sejalan dengan tolak ukur tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus menerus.³²

5. Tujuan Partai Politik

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan partai politik dibagi menjadi dua macam yaitu:

³² Ramlan subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010, h. 154

a. Tujuan utama partai politik

- 1) Merealisasikan yang di cita-citakan bangsa Indonesia yang berada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia.
- 3) Meningkatkan demokrasi yang didasarkan pada Pancasila serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

b. Tujuan khusus partai politik

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁴

6. Partai Politik Islam

Lahirnya partai politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kaum agamawan pada masa kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak dari kalangan agamawan yang ikut terjun berpolitik praktis dengan mendirikan partai politik yang berbasis Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Syariat Islam (PSI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).³⁵

a. Pengertian Partai Politik Islam

³³ Timredaksi Fokus Media, *Undang-Undang Politik*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), h. 150-151

³⁴ *Ibid*, h. 151

³⁵ Inu Kencana Syafii'e, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 229

Partai politik Islam adalah partai politik yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan cara yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik dari tingkat eksekutif maupun legislatif. Proses dengan mendapatkan kedudukan ini dengan cara ikut dalam kampanye serta pemilu dengan cara memberikan program-program yang sesuai dengan nilai-nilai idiologi Islam.

b. Prinsip-Prinsip Dasar Partai Politik Islam

Prinsip adalah suatu hal yang dipegang teguh dan dijadikan pijakan oleh partai Islam yang mendasari segala aktivitas keorganisasian. Sebagai partai yang menggunakan lebel dan atribut Islam serta mewakili kepentingan kaum muslim, partai Islam harus mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya pada prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Berpedoman pada nilai-nilai universal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran umat Islam yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Kedua sumber ajaran Islam tersebut memuat nilai-nilai universal yang mencakup segala kehidupan manusia dimuka bumi ini.
- 2) Musyawarah. Setiap keputusan-keputusan organisasi harus melalui koordinasi dan komunikasi dengan segenap pengurus yang memiliki wewenang. Dengan proses koordinasi tersebut, partai akan mendapatkan banyak pertimbangan dari beragam pihak sehingga melahirkan keputusan yang bijak dan berkesan buru-buru.

- 3) Berlaku adil. Setiap pimpinan dan anggotanya memiliki hak yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing partai. Karena itu, partai harus membuat keputusan yang adil untuk sebuah keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- 4) Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan. Perbedaan adalah fitrah setiap manusia dan merupakan anugerah dari yang maha kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan beragam. Namun, perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan bukan malah menimbulkan perpecahan.³⁶

c. Tujuan dan Fungsi Partai Islam

Tujuan dan fungsi partai politik Islam adalah:

- 1) Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu.
- 2) Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup, makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya dari segi materi tetapi juga dari segi psikis.
- 3) Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun

³⁶Ridho Al-Hamid, *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 1

tindakan kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.³⁷

E. Koalisi Partai Politik

Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Dasar pertimbangan ini menuntut kesediaan partai dan para pendukungnya untuk menyadari bahwa koalisi bukan sekedar mencari teman dan semuanya selesai. Selektif dalam hal koalisi adalah hal yang penting.

1. Pengertian Koalisi Partai Politik

Koalisi adalah upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi serta memerlukan aksi bersama para anggota.³⁸ Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat.

Dalam pemerintahan, dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa berarti sebuah gabungan beberapa negara yang

³⁷Ibid, h. 10

³⁸Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 221

dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang atau warga negara yang bergabung karena tujuan yang serupa.

Hakikat sebuah koalisi adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomus*) dan tahan lama (*durable*). Pemerintahan yang kuat akan mampu melawan semua ancaman dari dalam dan luar negeri. Masyarakat menginginkan pemerintah mampu menjaga negara ini dengan baik.

Meski cukup banyak negara yang pemerintahannya dibangun dengan cara koalisi, namun perlu diketahui bahwa sebuah negara yang menganut pola multipartai tampaknya lebih goyah dan lebih banyak mengalami penggantian pimpinan negara.³⁹

2. Bentuk Koalisi Partai Politik

Mengacu pada teori Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, antara lain:⁴⁰

a. Koalisi Berbasis Ideologi

Teori koalisi berbasis ideologi berfokus pada pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai sebagai pertimbangan dalam membentuk koalisi. Karena memilih dan mempertahankan kebijakan terbaik menjadi dorongan utama, maka pertalian ideologi menjadi dasar pembentukan koalisi. Oleh karena itu, besar kecilnya koalisi tidak menjadi kriteria utama dalam merangkul atau mengesampingkan satu partai.

b. Koalisi Kemenangan Minimal (*minimal-winning coalition*)

³⁹Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 269.

⁴⁰<http://jenisdancarakoalisi.com> diakses pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 12.30 WIB

Teori ini menyatakan prinsip dasar koalisi berada pada maksimalisasi kekuasaan dan meraih jabatan pemerintahan sebanyak mungkin. Teori kemengan minimal ini beranggapan bahwa duduk di pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material. Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik yang memperoleh kursi di kabinet dengan menghitung kemungkinan kemenangan suara terbanyak, yakni 50%+1. Biasanya peserta koalisi akan berhenti menjadi rekan baru ketika perolehan kursi parlemen 50% telah terlampaui.

c. Minimal Range Coalition

Dasar dari pelaksanaan koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan.

d. Minimum Size Coalitition

Koalisi ini merupakan partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk bergabung demi untuk sekedar mencapai suara mayoritas.

e. Bargaining Proposition

Merupakan koalisi dengan jumlah anggota partai paling sedikit untuk memudahkan proses negoisasi dalam pemerintahan dan dalam pembentukan kebijakan. Dasar dari teori ini dilaksanakan adalah untuk memudahkan proses tawar-menawar dan negoisasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.

F. PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.⁴¹

Pemilihan kepala daerah adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu berasal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat.

2. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 yang membahas mengenai pembentukan pemerintah daerah, menghasilkan undang-undang dan peraturan lainnya yang membahas tentang pemerintah daerah, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965,

⁴¹Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁴²

Peraturan yang membahas tentang pilkada secara langsung dan serentak pada tahun 2015 adalah UU No. 22/2014, Perpu No.1/2014, Perpu No. 1/2014, UU No. 1/2015, dan UU No. 8/2015. Perundang-undangan mengenai pemerintah daerah saat ini adalah UU No. 23/2014 yang membahas Pemerintah Daerah, Perpu No. 2/2014 membahas perubahan atas UU No. 23/2014 mengenai Pemerintah Daerah.⁴³

3. Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilukada adalah cara demokrasi dan demokratisasi pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara rekrutmen politik tingkat lokal yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif, seperti pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.⁴⁴ Pemilihan kepala daerah dengan cara langsung merupakan cara untuk mendekatkan masyarakat dengan pemimpin daerah. Wakil rakyat yang menjadi pemimpi dari tempat tinggal yang didudukinya akan lebih mudah untuk bersosialisasi dan mengetahui latar belakang pemimpin tersebut serta mudah untuk menyampaikan aspirasi. Berbeda dari orde baru, dimana kepala daerah dipilih dari pusat sehingga masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasinya.⁴⁵ Pada masa Orde

⁴²Rambe Kamaru Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h. 25

⁴³Zubakhrum Tanjung, *Pilkada Serentak Penguat Demokrasi di Indonesia*, (Depok: Pustaka Kemang, 2016), h. 15

⁴⁴Indra J. Piliang, dkk, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Trio Rimba Persada, 2003), h. 296

⁴⁵Muhammad Aqil Irham, *Korupsi Demokrasi dalam Partai Politik: Studi Kasus Peyelenggaraan Pemilukada Lampung*, (Masyarakat: Jurnal Sosiologi 21 (1), 2016), h. 40

Reformasi banyak kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat, agar semua masalah yang ada di masyarakat bisa terselesaikan.

4. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Prihatmoko, pengertian asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:⁴⁶

a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara

⁴⁶Joko.J.Prihatmoko, *Men Demokratis Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Semarang: LP3M UN-WAHAS dan Pustaka Pelajar, 2007), h. 110-111

dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f) Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun. Tidak ada paksaan dalam memilih calon pemimpin yang akan dipilihnya.

5. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh masyarakat daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersamaan dengan wakil kepala daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:⁴⁷

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Tujuan dari dilaksanakannya pilkada adalah untuk membangun demokrasi tingkat lokal, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Yang sebelumnya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD tetapi sekarang melalui demokrasi rakyatlah yang memilih diadakannya pilkada langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih, untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah, agar menjadi lebih baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat dan juga sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Selain tujuan dari pilkada, kepala daerah memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Sebagai kepala daerah otonomi yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat.

⁴⁷https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 13.03 WIB

Soal pengangkatan seseorang kepala daerah haruslah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan kepala daerah yang diinginkan masyarakat yang dapat mensejahterakan rakyatnya dan melalui berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Sebagai kepala daerah otonomi, ia harus mendapat dukungan rakyat yang dipimpinnya.⁴⁸



⁴⁸Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2011), h. 151

BAB III

MESUJI DAN PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

C. Sejarah Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten yang masih baru, hasil pemecahan dari kabupaten Tulang Bawang.

Latar belakang pemekaran Kabupaten Mesuji adalah:

1. Kendali pemerintah yang masih jauh, seperti di bagian utara Kabupaten Tulang Bawang.
2. Melimpahnya sumber daya alam sehingga bisa mencukupi kebutuhan yang diperlukan di Kabupaten Mesuji.
3. Adanya ide untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa dilakukan dengan cara pelayanan masyarakat, adanya demokrasi, meningkatkan pembangunan perekonomian, serta bisa meningkatkan ketertiban dan kemandirian.

Secara yuridis disahkan menjadi Kabupaten baru pada tanggal 26 November 2008, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008. Ibukota Kabupaten Mesuji terletak di Kecamatan Mesuji. Berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat maka ditetapkan Kampung Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji sebagai ibukota Kabupaten Mesuji tepatnya di kampung wiralaga mulya. Pemilihan ibukota Kabupaten di Kecamatan Mesuji merupakan solusi terbaik sebagai tujuan pemerataan pembangunan, sehingga dalam hal ini Kabupaten Mesuji menggunakan prinsip “Segitiga Emas” karena

lokasi ini sangat strategis sebagai jalur yang menghubungkan tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mesuji sebagai pusat pemerintahan.

Kecamatan Mesuji Timur, sebagai sentra pertanian dan perikanan yang didukung oleh Kecamatan Rawa Jitu Utara, dimana Kecamatan Mesuji Timur sendiri sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan yang terakhir adalah Kecamatan Simpang Pematang dan Way Serdang yang secara geografis dilalui jalan Lintas Timur Sumatera, dijadikan sentra perdagangan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Tanjung Raya yang terdapat ditengah-tengah “Segitiga Emas” tersebut dengan sendirinya dapat menikmati pembangunan secara langsung atau tidak langsung akibat dari bergeraknya roda pemerintahan, pertanian, perkebunan serta perdagangan di Kabupaten Mesuji.

Tabel 4
Daftar Nama Kecamatan, Luas Wilayah
Kabupaten Mesuji

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Total	Jumlah Desa
1.	Way Serdang	294,42	13,48	20
2.	Simpang Pematang	139,61	6,39	13
3.	Panca Jaya	197,72	9,05	7
4.	Tanjung Raya	238,07	10,90	21
5.	Mesuji	274,73	12,58	11
6.	Mesuji Timur	810,20	37,10	20
7.	Rawajitu Utara	229,25	10,50	13
JUMLAH		2184,00	100,00	105

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 03 Juli 2018 pukul 15.48 wib

Berdasarkan table luas wilayah, rasio tertinggi serta jumlah desa berada di Kabupaten Mesuji dapat disimpulkan bahwa wilayah terluas di Kabupaten Mesuji berada di Kecamatan Mesuji Timur dengan luas 810,20 Km², sedangkan wilayah yang memiliki luas paling sedikit terletak di Kecamatan Simpang Pematang dengan luas 139,61 Km². Berdasarkan rasio terhadap total di Kabupaten Mesuji yang menepati angka tertinggi desa, terletak di kecamatan Simpang Pematang dengan jumlah 6,39. Urutan berdasarkan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Mesuji terletak pada kecamatan Tanjung Raya dengan jumlah 21 desa, kemudian untuk jumlah desa terendah terletak di kecamatan Panca Jaya dengan jumlah hanya 7 desa.

Kabupaten Mesuji masih mempunyai kampung pribumi yang terletak di Kampung Wiralaga Satu, Wiralaga Dua, Sungai Badak, Sri Tanjung, Kagungan Dalem, Nipah kuning, Sungai Cambai, Talang Batu dan Sungai Sidang) dan 66 (enam puluh enam) kampung yang berasal dari transmigrasi lokal.⁴⁹ Kampung pribumi berada di perairan pinggir sungai Mesuji yang bermata pencarian sebagai nelayan.

1. Kondisi Geografis dan Topografis⁵⁰

Letak geografis Kabupaten Mesuji adalah pada 5°-6° LS dan 106°-107° BT, Dilihat dari segi wilayah, Kabupaten Mesuji merupakan tempat yang sangat strategis serta mempunyai fungsi yang penting untuk peningkatan daerah sekitar. Kabupaten Mesuji berada di perlintasan yang menghubungkan Kabupaten serta Provinsi di Pulau Sumatera.

⁴⁹ Data Dokumentasi Penelitian 2016, *Sumber data:Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Mesuji.*

⁵⁰ www.mesujikab.go.id, diakses pada tanggal 03 september 2018 pukul 13.00 WIB

Dilihat dari segi administratif Kabupaten Mesuji berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang serta Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh karea itu, Kabupaten Mesuji terletak di jalur lintas Trans-Sumatera. Maka dari itu pemerintah pusat terlibat daam pembangunan Kabupaten Mesuji. dan turut bertanggung jawab dalam pembangunan wilayah Kabupaten Mesuji.

2. Luas Wilayah dan Demografi

Berdasarkan Unadang-Undang Nomor 49 Tahun 2008, luas wialayah daratan Kabupaten Mesuji yaitu 234.015 Ha, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 51.560 KK. Terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang tersebar di tujuh Kecamatan. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji dipengaruhi oleh pertumbuhan alami, penduduk pendatang dan penduduk keluar.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Way Serdang	22,652	20,785	43,437
2.	Simpang Pematang	13,215	12,172	25,387
3.	Panca Jaya	8,276	7,454	15,730
4.	Tanjung Raya	18,836	17,336	36,172
5.	Mesuji	10,696	9,793	20,489
6.	Mesuji Timur	16,206	14,614	30,820
7.	Rawajitu Utara	12,992	11,886	24,878
JUMLAH		102,873	94,040	196,913

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 03 Juli 2018 pukul 15.55 wib.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji dipengaruhi oleh pertumbuhan alami, penduduk pendatang dan penduduk keluar.

Tabel 6
Jumlah Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)	
		Th.2008	Th.2009	Th.2010	Th.2009	Th.2010
1	Mesuji	22.524	22.836	23.204	1,30	1,01
2	RawaJitu Utara	28.347	27.201	27.491	-4,04	1,07
3	Way Serdang	41.997	45.909	46.245	9,37	0,73
4	Simpang Pematang	25.888	22.708	23.106	-12,28	1,75
5	Tanjung Raya	33.307	33.527	33.898	0,66	1,11

6	Panca Jaya	13.300	15.682	15.930	17,91	1,58
7	Mesuji Timur	29.688	30.228	30.529	1,82	1,00
Kabupaten Mesuji		195.049	198.091	200.403	1,56	1,17

Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji Tahun 2016

Tingkat pendidikan di Kabupaten Mesuji cukup baik. Di tahun 2008, jumlah murid SD atau sederajat sebanyak 25.972 jiwa (65,89%). SLTP atau sederajat sebanyak 10.374 jiwa (26,32%), dan SLTA atau sederajat sebanyak 3.068 jiwa (7,78%). Sedangkan jumlah guru SD atau sederajat sebanyak 1.247 jiwa (57,65%), SLTP atau sederajat sebanyak 662 jiwa (30,61%), dan SLTA atau sederajat sebanyak 254 jiwa (11,74%).

Tabel 7
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Kecamatan	Jumlah Murid (jiwa)				Jumlah Guru (jiwa)			
		SD	SLTP	SLTA	Jumlah	SD	SLTP	SLTA	Jumlah
1	Mesuji	3.217	956	61	4.234	171	102	8	281
2	Tanjung Raya	4.320	2.111	811	5.795	194	155	58	168
3	Rawajitu Utara	3.655	1.497	643	7.826	35	33	0	427
4	Mesuji Timur	4.362	1.432	392	5.602	22	136	56	372
5	Simpang Pematang	3.228	1.562	813	7.242	7	96	98	367

						8			
6	Way Serdang	5.181	2.297	348	2.527	244	149	34	144
7	Panca Jaya	2.008	519	0	6.186	113	31	0	404
Jumlah		25.971	10.374	3.068	39.413	1.247	662	254	2.163
Presentase(%)		65,89	26,32	7,78	100,00	67,65	30,61	11,74	100,00

Sumber: Kecamatan dalam angka, Tahun 2009

Tabel 8
Jumlah SD, SMP, SMA menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA
1	Way Serdang	28	11	2
2	Simpang Pematang	14	8	2
3	Panca Jaya	11	3	1
4	Tanjung Raya	21	9	1
5	Mesuji	15	6	1
6	Mesuji Timur	22	8	1
7	Rawajitu Utara	15	3	1
Jumlah		126	48	9

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 03 Juli 2018 pukul 16.05 wib.

3. Jenis Lahan

Di Kabupaten Mesuji terdiri atas dua jenis lahan, yaitu lahan kering dan rawa-rawa. Dari segi kepemilikan lahan tersebut dimiliki oleh masyarakat, tanah Negara dan adanya lahan yang dimiliki oleh perusahaan. Lahan kering yang berada di Kabupaten Mesuji ada yang ditanami oleh masyarakat dan ada yang dikelola oleh perusahaan yang sudah memiliki izin untuk mengelolanya dari pemerintah. Tanaman yang dikelola masyarakat berupa singkong dan sawit ada pula yang menanam palawija dan persawahan. Tetapi masih ada lahan yang masih kosong yang belum dikelola.

4. Sektor Pertanian, Perkebunan, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Kabupaten Mesuji sangat cocok untuk dilakukan penanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, singkong, karet dan yang lainnya. Adanya lahan persawahan yang bisa menunjang kehidupan pangan masyarakat Mesuji.

Dibidang perkebunan, ada tujuh perusahaan yang berinvestasi yaitu perusahaan sawit, karet, aksia, dan tepung tapioka. Dari sektor perindustrian Kabupaten Mesuji kurang maksimal, yang disebabkan karena kualitas industry maupun sumber daya manusia.⁵¹ Keberadaan Kabupaten di lintas timur banyak masyarakat yang bejulan di pinggir jalan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Hal ini bisa mengurangi angka pengangguran dan angka kesejahteraan masyarakat.

5. Sektor Peternakan

Dari area lahan yang belum diusahakan maka Kabupaten Mesuji masih terbuka untuk investasi di sektor peternakan, sedangkan populasi ternak yang telah berproduksi diantaranya: sapi 16.070 ekor, kerbau 969 ekor, kambing 22.438 ekor, domba 477 ekor,

⁵¹Data Dokumentasi Penelitian Maret 2016, *Suber Data: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji Tahun 2016.*

babi 1.491 ekor, ayam buras 182.571 ekor. Dari jumlah peternakan di atas semua jenis peternakan telah berproduksi.⁵²

6. Sarana Dan Prasarana

Sebagai kabupaten yang masih baru, Mesuji masih banyak kendala dibagian sarana dan prasarana untuk menjadikan kegiatan pemerintah dan pelayanannya kepada masyarakat. Bagian sarana pemerintah bangunan masih banyak yang perlu direnovasi serta pelayanan kepada masyarakat masih kurang terrealisasikan.

D. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah Berdirinya DPD PKS Mesuji

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 9 jamadil ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002, adalah kelanjutan Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada hari senin, tanggal 26 rabiul awal 1419 H bertepatan dengan 20 juli 1989. Partai Keadilan Sejahtera dapat dikatakan sebagai sebuah aktualisasi pemahaman Islam para pendirinya. Sehingga dalam dasarnya Partai Keadilan Sejahtera mencantumkan Islam sebagai pedoman dasar organisasi.⁵³

Hasil pemilu di tahun 1999 gagal mendapatkan hasil yang ditentukan⁵⁴ membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan munculnya partai baru bernama PKS yang diharapkan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan.

⁵²Data Dokumentasi Penelitian 2016, *Sumber Data: Dinas Peternakan dan Kehutanan Mesuji 2016.*

⁵³ DPP PKS, AD/ART PKS, (Jakarta, 2005), h. 4

⁵⁴ Erwyn Kurniawan, *PKS Mengubah Pusaran Menjadi Arus Balik*, (Jakarta: Pustaka Fauzan, 2016), Cet. Ke-2, h. 11.

Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.⁵⁵

Partai Keadilan Sejahtera merupakan penerus Partai Keadilan karena memiliki persamaan tujuan dan cita-cita. Hal ini dinyatakan oleh pemimpin kedua partai, Dr. Hidayat Nur Wahid (Presiden PK) dan Drs. Al Muzzamil Yusuf (Ketua Umum PKS), saat mereka bersepakat di hadapan notaris pada 3 juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera memiliki satu Dewan Pimpinan Pusat yang berada di Jakarta, yang mengendalikan seluruh kegiatan yang ada dalam partai. Sementara untuk di tingkat provinsi Partai Keadilan Sejahtera memiliki kepengurusan yaitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dimana setiap provinsi memiliki 1 DPW, semua provinsi memiliki kepengurusan wilayah terlebih bagi provinsi yang baru melakukan pemekaran. Untuk kabupaten/kota Partai Keadilan Sejahtera memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di seluruh Indonesia dan untuk tingkat di bawahnya yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan di tingkat Desa/Kelurahan disebut (DPRA). Masing-masing organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab sendiri untuk mengurus struktur wilayah partai tersebut, agar lahirnya Partai Keadilan Sejahtera dapat dilaksanakan dengan baik.

Struktur Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera bentuknya seperti struktur negara dimana ada presiden partai yang membawahi bidang-bidang, setiap

⁵⁵ DPP PKS, *Sekilas Partai keadilan*, h. 25.

bidang membawahi departemen-departemen yang dipimpin oleh menteri-menteri dan perangkatnya. Roda organisasi dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (*central Board*). Selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (*Regional Board*) dan Dewan Pimpinan Daerah (*District Board*) yang mengelola wilayah setingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Awal berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Mesuji terbentuk seiring terbentuknya Kabupaten Mesuji yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Periode pertama kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Mesuji dipimpin oleh Hariyanto (2009-2014) kemudian periode ke II Maulani (2014-2019).⁵⁶

Partai Keadilan Sejahtera berlandaskan Al-Qur'an yang meliputi surat al-Syura: 13, al-Nur: 55, al-Shaf: 10-13, Al-an'am: 153. Dasar Partai Keadilan Sejahtera merupakan kesempurnaan Islam, agama dan negara agar semua kegiatan, tingkah laku yang dilakukan lebih baik.

Partai Keadilan Sejahtera memiliki lambang kotak persegi empat yang melambangkan kesetaraan, keteraturan, dan keserasian dan warna hitam yang melambangkan aspiratif, akomodatif, dan kepastian. Lambang dua bulan sabit melambangkan kemenagan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah. Untaian 17 butir padi pada padi tegak lurus diantara dua bulan sabit melambangkan adil, ukhuwah, istiqomah, berani dan tegas dalam mewujudkan kesejahteraan, tulisan "SEJAHTERA" diatas kotak hitam terdapat sebuah persegi

⁵⁶ Hariyanto, *Ketua bidang kaderisasi DPD PKS Mesuji*, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 16 Oktober 2018.

panjang yang panjangnya sama dengan kota dbawahnya tetapi dengan ketigian yang lebih rendah di dalanya tertulis “PARTAI KEADILAN” dengan warna kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan kejayaan.⁵⁷

2. Struktur organisasi DPD PKS Mesuji

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Hubungan kerja dalam sebuah organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis dengan orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, struktur organisasi tersebut diatas:

- a. Struktur organisasi Partai ditingkat pusat adalah:
 - 1) Majelis syura
 - 2) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
 - 3) Majelis Pertimbangan Pusat
 - 4) Dewan Pengurus Pusat
 - 5) Dewan Syariat Pusat
- b. Srtuktur organisasi Partai ditingkat provinsi adalah:
 - 1) Majelis Pertimbangan Wilayah
 - 2) Dewan Pengurus Wilayah

⁵⁷ Ibid h. 17

- 3) Dewan Syar'at Wilayah
- c. Struktur organisasi Partai ditingkat Kabupaten/Kota:
 - 1) Majelis Pertimbangan Daerah
 - 2) Dewan Pengurus Daerah
 - 3) Dewan Syar'at Daerah
- d. Struktur organisasi Partai ditingkat Kecamatan adalah: Dewan Pengurus Cabang.
- e. Struktur organisasi Partai ditingkat kelurahan/desa adalah: Dewan Pengurus Ranting.

Dewan Pengurus Daerah PKS adalah eksekutif tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Didalam struktur DPD terdiri atas seorang ketua umum, beberapa ketua badan, seorang sekertaris umum dan beberapa wakil sekertaris umum, seorang bendahara umum, dan beberapa wakil bendahara umum sera beberapa bagian.⁵⁸

Syarat Ketua Umum, Sekertaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang Pembinaan Kader, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah adalah:

- a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewan dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 2 tahun.
- b. Pernah menjadi anggota dalam kepengurusan tingkat daerah.

⁵⁸ Erwyn Kurniawan, *PKS Mengubah Pasaran Menjadi Arus Balik*, (Jakarta: Pustaka Fauzan, 2016), Cet. Ke-2, h. 37.

- c. Taqwa, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Memiliki wawasan dakwah dan syar'ah, social, politik, hokum, dan kewilayahan yang memungkinkan melaksanakan tugas.
- e. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- f. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah.⁵⁹

Syarat ketua-ketua bidang lainnya, ketua-ketua badan, wakil sekertaris umum, dan wakil bendahara umum Dewan Pengurus Daerah adalah:

- a. Sekurang-kurangnya anggota dewasa.
- b. Pernah menjadi anggota dalam kepengurusan tingkat daerah.
- c. Taqwa, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Memiliki wawasan dakwah dan syar'ah, social, politik, hokum, dan kewilayahan yang memungkinkan melaksanakan tugas.
- e. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.

⁵⁹ *Ibid*,

- f. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah.

Ketua Umum Pengurus Daerah berwenang membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Tugas Struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- b. Menarik dan mengelola iuran anggota dan iuran wajib keanggota sesuai dengan panduan Dewan Pengurus Pusat.
- c. Menerima waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, dan tidak mengikat.
- d. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- e. Bersama Musyawarah Pimpinan Daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah Kabupaten/Kota Kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- g. Mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.

- h. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Cabang.
- i. Melaksanakan Musyawarah Daerah dan,
- j. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah adalah:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta lembaga-lembaga struktur di bawahnya.
- b. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah, dan
- c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah adalah:

- a. Mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- b. Membentuk dan mengesahkan struktur organisasi dan kepengurusan tingkat Kecamatan.
- c. Memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga struktur di bawahnya.
- d. Atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai dengan

memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, serta

- e. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, dan mutasi kader partai di daerah.

Tugas Operasional Dewan Pengurus Daerah adalah:

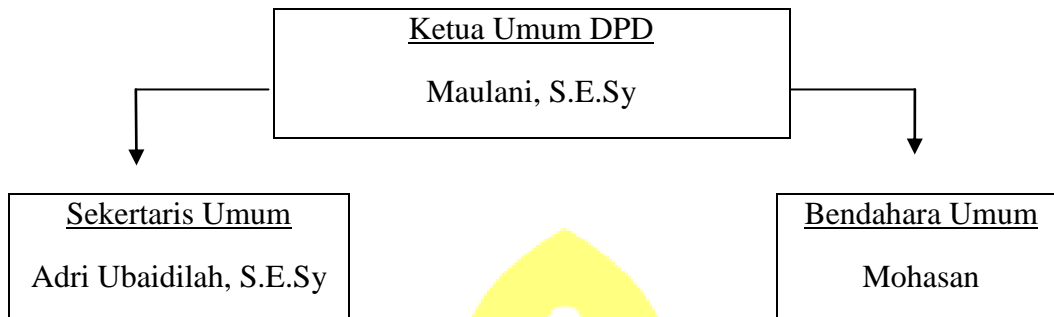
- a. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai.
- b. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang.
- c. Melaksanakan koordinasi kader partai anggota legislatif dan eksekutif serta⁶⁰
- d. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan.

Adapun struktur kepengurusan DPD PKS Mesuji diantaranya: Ketua Umum DPD PKS, Wakil ketua umum DPD, Sekertaris Umum DPD PKS dan Bendahara Umum DPD PKS.

⁶⁰ Ibid, h.38

Susunan Pengurus DPD PKS Mesuji

Masa Khidmat 2015-2020



Adapun bidang-bidang yang ada di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mesuji adalah:

- a. Bidang Kaderisasi, yang di ketuai oleh: H. Hariyanto, S.T.P dan
Sekertaris: Istuti, S.Pd.I
- b. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang di ketuai oleh:
Fitri Yuliasuti, S.P dan Sekertaris: Khomsiah
- c. Bidang Kepemudaan yang di ketuai oleh: Dadang Solihin, S.Pd.I
dan Sekertaris: Fajar Suryadi, S.Pd
- d. Bidang Polhukam yang di ketuai oleh: Edi Sandani, S.Pd dan
Sekertaris: Rahmat Nur Cahyo, S.P

3. Tujuan dan Karakteristik Partai Keadilan Sejahtera

Tujuan Partai Keadilan Sejahtera adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan
- b. Mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik suatu partai merupakan lambang keunikan sekaigus kekuatan partai tersebut. Karakteristik Partai Keadilan Sejahtera adalah:

- a. Moralis

Partai Keadilan Sejahtera berupaya menampilkan sisi moralis yang bersumberkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagai basis serta keteladanan, sebagai tonggak dalam program dan aktifitas yang digulirkan.

- b. Profesional

Diatas landasan moral, profesional akan berkembang secara positif dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Profesionalitas yang bercirikan pada penguasaan detail masalah akan mengantarkan partai pada kebijakan-kebijakan yang tepat dan bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

- c. Heroik

Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan karena dengan sasaran inilah dakwah Islam hendak ditegakkan. Bagi para kader partai perjuangan di jalan Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani demi tegaknya wibawa umat dan kemanusiaan pada umumnya.

4. Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera

Sebagai sebuah partai dakwah, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai Visi dan Misi dalam rangka menjalankan organisasinya, adapun Visi dan Misi tersebut adalah:

Visi umum: Sebagai Partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

Visi Khusus: Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis, dan bergotong royong menjaga kedaulatan Negara.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

- 1) Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.

- 3) Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam *rahmatul lil 'alamin*.
- 4) Cara untuk menjadikan masyarakat madani di Indonesia.⁶¹

Adapun Misi Partai Keadilan Sejahtera yaitu:

- 1) Menyebarkan dakwah Islam mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
- 2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
- 3) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
- 4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- 5) Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- 6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsure atau kalangan umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan wihdatul ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

⁶¹ Dendi Sutarto, *Perempuan dalam Politik Partai Keadilan Sejahtera*, (Yogyakarta: Titah Syurga, 2013), h. 61.

- 7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezholiman khusus terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

5. Pola Pengkaderan

Partai Keadilan Sejahtera melalui kadernya bisa menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang jarang dilakukan oleh partai politik lainnya. Seperti member pendidikan serta pemberdayaan politik terhadap rakyat melalui aktifitas-aktifitas serta kewajibannya sebagai warga negara dan menyadari wewenang dan kewajiban pemerintahannya.⁶² Pola rekrutmen dan seleksi PKS berbeda dalam perpolitikan Indonesia, kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu atau oleh *murabbi* (guru pembimbing) menggunakan metode tarbiyah berkesinambungan dan terjadwal (*halaqah*).

Perekruitmen kader, PKS menggunakan dua strategi. *Pertama*, pola rekrutmen individu (*al-da'wah al fardiyyah*), atau bentuk mendekati orang ke orang meliputi komunikasi personal dengan cara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga) *halaqah* (kelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual), *nadwah* (seminar). Sistem yang digunakan PKS hampir sama dengan sistem rekrutmen gerakan islamis di Mesir. *Kedua* adalah pola rekrutmen institusional (*ak-da'wah al'amma*). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi baik formal maupun nonformal, sehingga partai dapat mencari individu potensial untuk dijadikan kader partai.

⁶² Satria Hadi Lubis, *35 Manfaat akan alasan mengapa kita perlu mendukung PKS*, (Jakarta: Masyarakat Publication, 2003), h.v.

PKS mewajibkan kadernya ikut aktif dalam berbagai pelatihan hierakis yang disebut dengan *marhalah*. Pelatihan ini yang berisikan proses pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim*), pembinaan kader (*taqwim*), dan evaluasi (*taqwim*). Anggota PKS dalam sumpahnya harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat, dengan demikian sistem sumpah ini tidak mungkin non muslim menjadi kader PKS. Sesuai dengan munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader merupakan annota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

6. Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera

Beberapa rumusan Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Pertama Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan pensosialisasian, pendalaman dan pengayaan agar strategis, langkah, dan operasionalisasi yang akan diambil oleh partai lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera adalah:

- a. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis.
- b. Memberikan kerangka umum kepada partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya.
- c. Menjadi patokan umum dalam memposisikan partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.

- d. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.

7. Ideologi dan Platform PKS

a. Ideologi PKS

Sejak awal berdiri partai PKS mendeklarasikan dirinya sebagai partai islam. Lebih dari itu, partai PKS merencanakan untuk menjadi partai dakwah, yaitu partai yang mendeklarasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran islam kedalam kehidupan.

Semua ini sama terjadi ketika menjadi PK berubah menjadi PKS, PKS merupakan kontinuitas ideologi, pemikiran, serta *manhaj* perjuangan PK. Bahkan setelah menjadi PKS terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis dan artikulatif.⁶³ Anggaran Dasar menyebutkan bahwa PKS adalah partai yang berasaskan Islam, partai PKS bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴

b. Platform PKS

1) Pemantapan Ekonomi Makro

Membangun kembali fundamental ekonomi yang sehat dan mantap demi meningkatkan pertumbuhan, memperluas pemerataan, dan menjamin

⁶³ M. Imadudin Rahmat, *Ideologi politik PKS, dari masjid kampus hingga ke gedung parlemen*, (Jakarta:Lkis,2000) h. 144.

⁶⁴ AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta, 2005), h. 2.

kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan sasaran utama menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

2) Pemantapan Otonomi Daerah

Kebijakan Otonomi Daerah dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan, pembagian sumber keuangan yang adil dan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan agenda strategis, disamping penegakan hukum yang tegas atas setiap penyimpangan di daerah.

3) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedangang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengembangkan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.

4) Perjuangan Petani

Mengembalikan kedudukan sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian.

5) Perjuangan Buruh

Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migrant yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka. Membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih baik.

6) Perjuangan Nelayan

Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas. Mengembangkan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan.

7) Usaha Kecil dan Menengah

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai penguatan sektor UKM yang terbukti telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Memacu kinerja kelompok pengrajin, pengusaha tekstil, pengolah bahan pangan, pedagang eceran sampai asongan yang bertahan di masa kritis, agar ekonomi Indonesia bangkit dengan basis yang lebih mandiri.

8) Politik Nasional

Memastikan konsolidasi demokrasi dengan kehadiran pemimpin nasional yang amanah dan bersih. Tetapi membangun sistem politik yang sehat dan kuat lebih mementukan, sehingga sejumlah agenda besar harus dijalankan untuk membenahi lembaga publik agar representatif dan bertanggung-jawab.

9) Pertahanan Keamanan

Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar pertahanan dan keamanan negara. Menempatkan polisi selaku aparat penegak hukum dan tentara sebagai alat pertahanan negara. Menghadapi gejolak masyarakat dengan

metode dialog dan perdamaian, disamping penegakan hukum dan perwujudan kesejahteraan.

10) Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Memadukan proses penegakan hukum yang bertanggung-jawab agar tidak terpisahkan dengan perlindungan HAM. Melakukan terobosan hukum dalam memerangi korupsi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, demi memutuskan hubungan dengan penyimpangan di masalah sebagai manifestasi keadilan transisional.

11) Politik Luar Negeri

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

12) Pendidikan Nasional

Menjadikan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia yang utuh. Merancang sistem pendidikan nasional yang komprehensif dengan cakupan alternatif pembiayaan yang murah tapi berkualitas. Merealisasikan alokasi 20% anggaran negara bagi kemajuan pendidikan, terutama demi peningkatan kesejahteraan pendidik.

13) Kepeloporan Pemuda

Membina pemuda hari ini sebagai calon pemimpin masa depan. Menyelamatkan generasi muda Indonesia yang terjerat dalam baying-bayang budaya global dan dekadensi moral, dengan strategi pembelajaran kolektif

kaum muda dalam memahami sejarah bangsa dan mensiasati masa depan yang penuh tantangan.

14) Perempuan Indonesia

Mendorong suasana kemitraan yang tulus antara kaum perempuan dan lelaki diatas landasan ketaqwaan, dengan orientasi kerja menebar kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mewujudkan perempuan Indonesia yang bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.

15) Pembinaan Keluarga

Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya masyarakat Indonesia aman dan damai, adil, dan makmur. Mengarahkan keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.

16) Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

Menetapkan visi kesehatan paripurna selaku panduan strategis untuk dijalankan secara berkelanjutan. Mengalokasikan anggaran negara yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas sehingga bagian amat penting dari wujud kesejahteraan sosial.

17) Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung-jawab internasional. Menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni.

18) Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Industri

Mensinergikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai jalan keluar untuk merintis kembali pembangunan industry strategis yang kolaps. Selanjutnya meningkatkan penguasaan iptek menjadi tiket utama menuju Indonesia yang maju dan mandiri.

19) Seni, Budaya Dan Pariwisata

Membentuk bangsa yang memiliki disiplin kuat, etos kerja, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu karakter warga bangsa yang tangguh.

20) Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama

Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitranya selaku hamba Allah dengan mencontohkan, menyeru kepada kebaikan, dan membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati.

21) Komunikasi Dan Informasi

Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berekspresi agar tidak dikekang oleh kepentingan politik tertentu.⁶⁵

⁶⁵65 DPP PKS, *Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, h. 58.

BAB IV

STRATEGI PKS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan pemimpin masyarakat di lembaga legislatif maupun eksekutif, dan sebagai sarana untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu peningkatan proses demokrasi di Indonesia.

Politik selalu ada persaingan karena dalam setiap kekuasaan pasti selalu ada pihak penentang dan pihak pendukung sehingga kehadiran pertempuran untuk mengakhiri perebutan kuasa dan pengaruh merupakan kunci utama. Kebebasan untuk membentuk banyak partai bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berpolitik dan mengerti bagaimana cara berpolitik dengan cara yang baik. Demokrasi yang mampu memberikan ruang kebebasan dan aspirasi masyarakat terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Kekompakan dan serius dalam berpolitik memberikan dampak yang positif bagi kader, dengan tidak adanya persaingan sengit antarkubu memberikan motivasi tersendiri untuk ikut berpartisipasi. Kader yang berkualitas mampu memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan partai.

Konsekuensi seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional partai harus taat kepada aturan yang ada. Setiap partai politik mempunyai aturan

masing-masing, apabila kader partai politik membuat peraturan tentang kebijakan, program dan langkah harus melihat aturan yang ada di dalam partai politik.

C. Bentuk Kerjasama Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dengan Kamami-Saply

Efektivitas sebuah partai salah satunya ditentukan oleh kemampuan partai tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai.

Koalisi merupakan cara partai politik agar calon yang didukungnya mendapatkan suara terbanyak. Berkoalisi dengan cara yang baik dan mempunyai tujuan yang sama akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam sejarah pemerintahan, umumnya negara yang menganut sistem multipartai roda pemerintahannya dibangun atas koalisi sejumlah partai politik. Hal ini disebabkan karena dukungan suara yang diberikan oleh warga negara dalam pemilihan umum terpecah-pecah melalui banyak partai sehingga sangat sulit dicapai suara mayoritas.⁶⁶

1. Dukungan Politik

Beberapa negara menginginkan stabilitas politik terhadap kepemimpinan partai harus memiliki pemikiran yang rasional, misalnya seberapa besar kekuatan yang telah dimiliki partai politik dan partai apa yang akan diajak untuk berkoalisi, bagaimana

⁶⁶Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 268.

ideologinya, kekuatan dan kelemahan partai dalam hal massa, serta apa tantangan dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan cara koalisi.⁶⁷

Partai Keadilan Sejahtera mendukung sepenuhnya kepada pasangan Khamami-Saply pada pemilihan kepala daerah Mesuji tahun 2017 terbukti bahwa dua kali Khamami mencalonkan diri sebagai Bupati, Partai Keadilan Sejahtera mendukung kembali pada periode kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera percaya akan kinerja Khamami.

Sebelum memilih Khamami dan Saply sebagai bupati dan calon bupati, partai keadilan sejahtera melakukan survei terlebih dahulu. Tujuan survei tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat popularitas dan kinerja Khamami-Saply di masyarakat. Dari hasil survei menunjukkan bahwa tingkat popularitas sangat tinggi dan kinerjanya bagus.

Setelah mengetahui hasil survei maka jajaran pengurus DPD PKS Mesuji melakukan musyawarah untuk menentukan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mesuji. Hasil musyawarah tertuang dalam surat rekomendasi DPD PKS Mesuji Nomor: 03/SKEP/AH/-08-PKS/VI/2016 pada tanggal 02 Juni 2016. Isi surat tersebut adalah merekomendasikan calon bupati dan wakil bupati Mesuji periode 2017-2022.

Surat rekomendasi tersebut dibawa ke DPW Lampung untuk dimusyawarahkan. Hasil dari musyawarah DPW Lampung mengajukan surat rekomendasi kepada dewan pengurus pusat partai keadilan sejahtera. Pada tanggal 25 Agustus 2016 Nomor:

⁶⁷*Ibid* h. 269

795/SKEP/DPP-PKS/1437 Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera memutuskan bahwa Khamami-Saply menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mesuji periode 2017-2022.

Agus Kurniawan, selaku ketua bidang kaderisasi DPW PKS Lampung mengatakan:

“emmmmm alasan kami partai pks mendukung pasangan Khamami-Saply pada pilkada Mesuji 2017 adalah keterbatasan kader di kabupaten Mesuji dan kami partai pks melakukan survei di kabupaten Mesuji, hasil survei tersebut adalah bahwa tingkat popularitas Khamami di masyarakat sangat tinggi, kami dan anggota partai di DPD PKS Mesuji melakukan musyawarah tentang pemilihan calon bupati di Mesuji. Setelah melakukan musyawarah, keluarlah surat rekomendasi calon bupati dan wakil bupati dari kabupaten Mesuji, eeee.....isi surat tersebut memberikan dua nama untuk dicalonkan, lalu kami jajaran pengurus di tingkat wilayah melakukan musyawarah dan akhirnya mengajukan calon bupati kepada dewan pengurus pusat”.⁶⁸

2. Sosialisasi

Memperluas wilayah-wilayah jangkauan politik secara geografis dan demografis, mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola. Memperkuat sosialisasi politik melalui kampanye secara langsung. Kampanye merupakan metode untuk menyakinkan seseorang agar mereka bersedia ikut dan mendukungnya.⁶⁹

Partai keadilan sejahtera melakukan koordinasi dengan partai yang ikut berkolisi dalam pilkada Mesuji tahun 2017 yang bertujuan untuk menyatukan dukungan agar

⁶⁸Agus Kurniawan, *Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW PKS Lampung*, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 25 Januari 2019.

⁶⁹Bowo Sugiarto, dkk, *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 27, No. 3, 2014), h.145

pasangan Khamami-Saply bisa menang. Sosialisasi yang baik dan adanya kesamaan visi misi maka akan mudah melakukan koalisi.

Sosialisasi Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat dengan cara memberikan penjelasan isi dari visi dan misi pasangan Khamami-Saply, agar masyarakat yang hanya sebatas mengenal bisa faham akan sosok pasangan Khamami-Saply dan masyarakat yang belum mengenal bisa mengetahui bagaimana sosok serta visi dan misi Khamami-Saply. Satu kader diwajibkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat minimal 10 rumah dalam satu hari, sehingga dengan cara ini sosialisai kepada masyarakat lebih terarah dan terstruktur.

3. Pengarahan Kader

Kader sangat penting dalam partai politik, karena dengan adanya kader akan mempermudah jalannya organisasi partai politik. Partai Keadilan Sejahtera mengarahkan kadernya untuk saling berkoordinasi dengan jajaran anggota Partai Keadilan Sejahtera agar tidak adanya kesalahfahaman sehingga proses sosialisasinya bisa berjalan dengan lancar.

Adri Ubaidilah, selaku Sekertaris Umum DPD PKS Mesuji mengatakan:

“peran serta koalisi yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah mesuji tahun 2017 adalah dengan pendampingan kampanye dan menggerakkan seluruhstruktur dari DPD, DPC sampai DPH untuk memenagkan pilkada mesuji tahun 2017”.⁷⁰

Hariyanto, selaku ketua bidang kaderisasi DPD PKS Mesuji mengatakan:

⁷⁰Adri Ubaidilah, *Sekretaris umum DPD PKS Mesuji*, wawancara dengan penulis, Mesuji, 15 Oktober 2018.

“Jadi pada pilkada mesuji 2017 itu kan pilkada mesuji pks berkoalisi dengan Nasdem, Golkar dan lainnya kecuali Hanura dan PDIP untuk mengusung khamami,,eee kalau dari sisi untuk mendapatkan suara sudah maksimal,,,,,karena kemaren terbukti menang, apalagi pasangan yang kami dukung,,,,,eeee,,pak khamami itu kan incumbent dan mempunyai jiwa sosial dan semangat membangun mesuji agar lebih baik”.⁷¹

Pejabat pertahana lebih mudah untuk bersosialisasi dan mengeluarkan modal besar karena rakyat sudah mengetahui bagaimana kinerjanya. Berbeda dengan kandidat baru yang harus berusaha semaksimal mungkin dan mengeluarkan dana untuk sosialisasi dirinya, karakter, visi dan misi pencalonannya kepada masyarakat.⁷²

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya dengan cara menggerakkan seluruh anggota dan kader dapat memenagkan calon dukungan dan berkoalisi dengan partai politik yang sama-sama mendukung calon yang didukungnya lebih kuat.

4. Advokasi/Penjagaan Suara

Pentingnya advokasi dalam pemilihan umum adalah untuk mengantisipasi pelanggaran hukum yang terjadi. Partai Keadilan Sejahtera ikut terjun langsung ke TPS untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilihan. Banyak kader yang menjadi saksi dalam pemilihan, hal ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera berdedikasi tinggi terhadap pasangan yang diusung dan tidak menginginkan terjadinya pelanggaran hukum.

D. Strategi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Untuk Pasangan Khamami-Saply

⁷¹Hariyanto, *Ketua bidang kaderisasi DPD PKS Mesuji*, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 16 Oktober 2018.

⁷²Ruslan Ismail Mage, *Berpolitik Dengan Biaya Murah*, (Bantul: Thafa Media, 2013), h. 6

Strategi politik adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita politik. Strategi yang matang sangat penting dalam pemilihan, sebab strategi menentukan kemenangan. Politik selalu ada pertarungan karena dalam setiap kekuasaan partai selalu ada pihak penentang dan pihak pendukung sehingga kehadiran pertempuran untuk mengakhiri perebutan kekuasaan dan pengaruh sangatlah penting.

1. Strategi Pra Pilkada

Dalam berkampanye harus berdasarkan strategi yang berdasarkan keadaan dalam kampanye berlangsung. Partai Keadilan Sejahtera melakukan kampanye dengan cara menggunakan partai politik yang sudah dikelola sebelum pilkada berlangsung agar bisa memenangkan pemilihan pada tahun 2017.

Edi Sandani selaku ketua Polhukam PKS Mesuji mengatakan:

“Hemm, bukan hanya Partai PKS semua partai mempunyai bidang pemegang pemilu di Polhukam PKS”⁷³

Sebagai partai kader PKS tentunya mengharapkan kerja keras dari seluruh kadernya untuk dapat memenangkan pemilu sesuai dengan target yang ditetapkan. Strategi yang bagus akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan berkoordinasi dengan baik, kerjasama yang solid dan adanya evaluasi mendorong menjadi lebih kuat. Adanya komunikasi antara masyarakat, kader dan pengurus partai akan mudah dalam menjalankan visi dan misi partai dalam pemilihan kepala daerah.

Maulani, selaku ketua DPD PKS Mesuji mengatakan:

⁷³Edi Sandani, *Ketua Bidang Polhukam*, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 10 Oktober 2018.

“Strategi yang kami gunakan untuk mengusung calon kami dengan cara *door to door*, kader kami kerahkan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang visi dan misi calon dukungan kami. Dengan cara tersebut kami berharap masyarakat dapat memahami akan visi dan misi calon dukungan kami dan masyarakat dapat memilih dukungan kami sehingga dukungan kami dapat menang. Kader yang cerdas mampu melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan baik.. Dengan begitu semua upaya yang kami lakukan bisa terlaksana dengan baik. Bentuk kerjasama yang kami lakukan adalah dengan cara mendukung pak khamami dengan sepenuhnya, memberikan sosialisasi kepada kader, sosialisasi kepada masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera ikut berkampanye dan banyak kader yang menjadi saksi dalam pilkada.”⁷⁴

Edi Sandani, selaku ketua Polhukam PKS Mesuji mengatakan:

“Figur calon dari kami lebih dominan dari peran partai, sehingga kami percaya bahwa calon dukungan kami pasti menang. Dalam menjalankan tugas sebagai bupati, pak khamami memberikan contoh yang baik dan terjun langsung kelapangan, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung.”⁷⁵

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan PKS dalam Pilkada Mesuji tahun 2017 dengan cara kader mendatangi rumah masyarakat untuk menjelaskan tentang visi dan misi calon dukungan dan sosok figur yang dominan dibandingkan dengan partai, hal ini menunjukkan bahwa peran PKS dalam mendukung calon yang didukungnya sangat bagus.

2. Strategi Saat Pilkada

Langkah yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera pada saat pemilihan berlangsung adalah dengan cara melakukan pengawasan, agar tidak adanya pelanggaran disaat pemilihan berlangsung. Partai Keadilan Sejahtera melakukan konsolidasi internal, konsolidasi dengan partai pendukung dan sosialisasi kepada pemilih Partai Keadilan Sejahtera.

⁷⁴Maulani, *Ketua DPD PKS Mesuji*, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 15 Oktober 2018.

⁷⁵Edi Sandani, *Op. Cit.*,h. 96.

Edi Sandani, selaku ketua Polhukam PKS Mesuji mengatakan:

“...eeee yang kami lakukan saat pilkada berlangsung adalah melakukan konsolidasi internal, konsolidasi dengan partai pendukung dan sosialisasi kepada pemilih Partai Keadilan Sejahtera hal ini agar tidak ada kesalahfahaman”.⁷⁶

3. Strategi Pasca Pilkada

Startegi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera setelah pemilihan kepala daerah adalah mengawal pemerintahan bupati terpilih dengan memberikan masukan dan saran terkait kebijakan pemerintah daerah. Hal ini agar pemerintahan yang ada di Mesuji lebih baik dan keluhan kesah masyarakat bisa teratasi.

Edi Sandani, selaku ketua Polhukam PKS Mesuji mengatakan:

“eeeeee sebagai partai pendukung Khamami-Saply kami partai keadilan sejahtera melakukan pengawalan dan memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan kebijakan dan menyampaikan apa yang diharapkan rakyat kepada Khamami-Saply”.⁷⁷

Untuk menjalankan suatu program kegiatan tidak bisa dipungkiri adanya partisipasi dari masyarakat dan memberikan kontribusi untuk program yang dijalankan PKS secara bertahap.

Ansori selaku masyarakat mengatakan:

“kalau menurut saya program yang dilakukan PKS dalam kegiatan pilkada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti kampanye, karena dalam kampanye bisa mengetahui bagaimana visi dan misi calon dukungan, dan adanya baksos yang menjadi penunjang kegiatan PKS dalam pilkada”.⁷⁸

⁷⁶Edi Sandani, *Op. Cit.*,h. 97

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸Ansori, *Masyarakat Kabupaten Mesuji*, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 16 Oktober 2018.

David selaku masyarakat mengatakan:

“kalau pendapat saya mengenai program PKS dalam kegiatan pilkada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya seperti kampanye dan peduli sosial gitu”.⁷⁹

Wawancara diatas menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat sudah ada yang merasakan ada pula yang belum merasakan dari program PKS pada pilkada mesuji 2017.



⁷⁹David, *Masyarakat Kabupaten Mesuji*, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 16 Oktober 2018.

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

Koalisi partai politik sering terjadi di negara yang menggunakan sistem multipartai, karena hasil pemilu kerap menunjukkan kekurangan suara. Dampaknya perlu ada koalisi partai politik untuk membentuk pemerintahan dan juga koalisi di parlemen dalam hal pengambilan keputusan tertentu. Dengan adanya koalisi suara akan menjadi lebih banyak dan pasangan yang diusung akan lebih dominan.

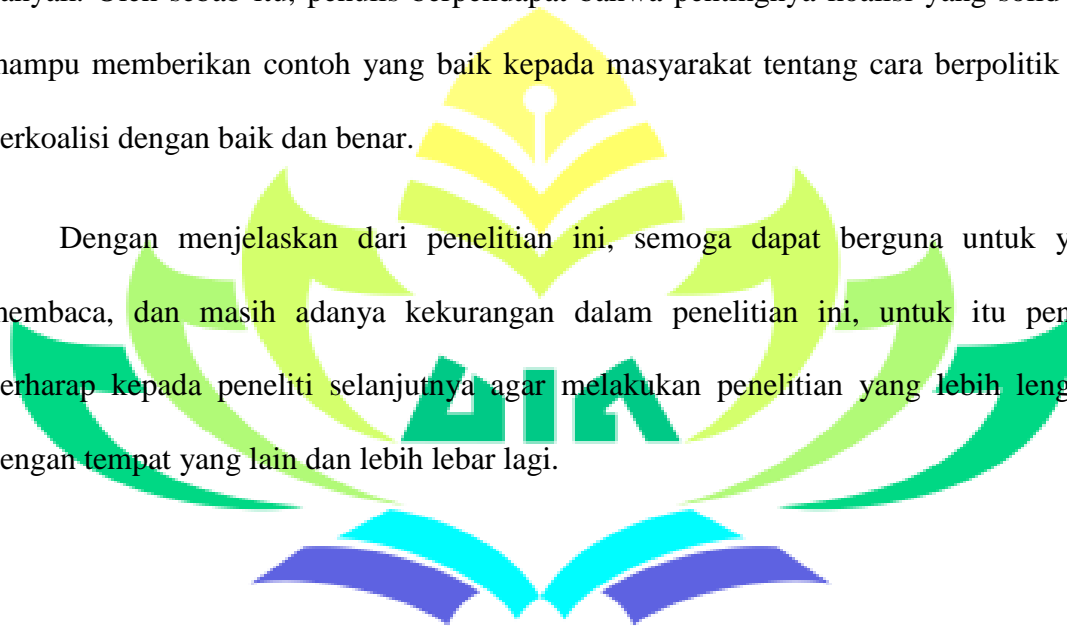
Bentuk dukungan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan kepala daerah Mesuji 2017 dengan cara partai keadilan sejahtera memberikan dukungan penuh terhadap Khamami-Saply, sosialisasi, pengarahan kader dan Penjagaan suara. Hal ini diharapkan agar Khamami-Saply bisa memenagkan pilkada Mesuji tahun 2017.

Startegi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan kepala daerah Mesuji 2017 sebelum pemilihan dengan cara mengoptimalkan kampanye langsung kepada masyarakat dengan cara *door to door* untuk menjelaskan visi misi dari pasangan yang didukung, saat pilkada berlangsung Partai Keadilan Sejahtera melakukan konsolidasi internal, konsolidasi dengan partai pendukung dan sosialisasi kepada pemilih Partai Keadilan Sejahtera dan setelah pilkada Partai Keadilan Sejahtera mengawal pemerintahan bupati terpilih dengan memberikan masukan dan saran terkait kebijakan pemerintah daerah.

D. Saran

Skripsi ini bisa dicerna dengan nyata bahwa pembahasan yang memaparkan mengenai koalisi partai Islam dalam pemilihan kepala daerah Mesuji 2017 khususnya strategi Partai Keadilan Sejahtera, harus bisa lebih baik. Sebab metode yang digunakan memenangkan calon dukungannya perlu adanya kolaisi partai politik. Karena dengan adanya koalisi, pasangan yang didukung akan lebih kuat dan suara yang diperoleh lebih banyak. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa pentingnya koalisi yang solid dan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang cara berpolitik dan berkoalisi dengan baik dan benar.

Dengan menjelaskan dari penelitian ini, semoga dapat berguna untuk yang membaca, dan masih adanya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih lengkap dengan tempat yang lain dan lebih lebar lagi.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Agustino, Leo. 2009, *Pilkada dan Dinamika Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Hamid, Ridho. 2009, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asshidiqie, Jimly. 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Budiardjo, Miriam. 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Cangara, Hafied. 2009, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 1993, *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM.
- Hasan, Iqbal. 2002, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harun, Rachjatsumarno. 2006, *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung, Mandar Maju.
- Irawan, Prastya. 1999, *Logika dan prosedur penelitian*. Jakarta: Setiawan pers.
- Ismail Mage, Ruslan. 2013, *Berpolitik Dengan Biaya Murah*. Bantul: Thafa Media.
- Jafar Hafsah, Muhammad. 2011, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- J. Prihatmoko, Joko. 2007, *Men Demokratis Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Semarang: LP3M UN-WAHAS dan Pustaka Pelajar.

- Kaelan, 2005, *Metode penelitian Kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil. 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Kamaru Zaman, Rambe. 2016, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Jakarta: Mizan Publika.
- Kencana, Inu Syafii'e. 1996, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kurniawan, Erwyn. 2016, *PKS Mengubah Pusaran Menjadi Arus Balik*. Jakarta: Pustaka Fauzan.
- Lijphart, Arend. 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moh. Nazir. 2011, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mukthie Fadjar, Abdul. 2012, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Piliang, Indra J., dkk. 2003, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. (Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2017/2018
- Rais, Amien. 1998. *Melangkah Karena Dipaksa Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Redaksi Puspa Swara. 2007, *UUD 1945 & Perubahannya*. Jakarta: Puspa Swara.
- Suebakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Graseido.
- Sujana, Nana. 1987, *Karya Ilmiah, Makalah Skripsi, Tesis, Desertasi*. Semarang: Sinar Baru.
- Sutarto, Dendi. 2013, *Perempuan dalam Politik Partai Keadilan Sejahtera*. Yogyakarta: Titah Syurga.
- Sutopo, H.B. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

ThoyibdanSugiyanto.2002,*Islam danPranataSosialKemasyarakatan*. Jakarta: PT. RemajaRosdakarya.

Tanjung,MB. Zubakhrum. 2016,*Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kemang.

Narbuko, Choliddan Abu Achmadi.1997,*MetodePenelitian*. Jakarta: BumiAksara.

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2002 tentangPartaiPolitikpasal 1.

WAWANCARA

Ansori, Masyarakat Kabupaten Mesuji, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 16 Oktober 2018.

David, Masyarakat Kabupaten Mesuji, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 16 Oktober 2018.

Hariyanto, Ketua bidang kaderisasi DPD PKS Mesuji, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 16 Oktober 2018.

Kurniawan, Agus, KetuaBidangPembinaan Kader DPW PKS Lampung, Wawancaradenganpenulis, Bandar Lampung, 25 Januari 2019.

Maulani, Ketua DPD PKS Mesuji, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 15 Oktober 2018.

Sandani, Edi, Ketua Bidang Polhukam, Wawancara dengan penulis, Mesuji, 10 Oktober 2018.

Ubaidillah, Adri, Seketaris umum DPD PKS Mesuji, wawancara dengan penulis, Mesuji, 15 Oktober 2018.

SUMBER DOKUMEN

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, SetdaKabupaten Mesuji Tahun 2016.

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji Tahun 2016.

Sumber: DinasPeternakandanKehutanan Mesuji 2016.

Sumber: AD/ART Partai Keadilan Sejahtera.

SUMBER JURNAL

Irham, Muhammad Aqil, *Korupsi Demokrasi dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung*, (Masyarakat: Jurnal Sosiologi 21 (1), 2016).

Malay, M. Nursalim, *Sikap Partai Politik Dalam Perubahan UU Pemilu*, (Dosen Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin: Jurnal Tapis Vol.9 No.2 2013).

Zaafriil Razaqtiar, Arif, *Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Jukiyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*, (Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus-Desember 2016).

Yoga Pratama, Dimas, *Pelebagaan Partai Nasional Demokrat: Studi Penguatan Elektoral Di Kabupaten Nganjuk*, (Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari-Maret, 2015).

SUMBER INTERNET

<http://jenisdancarakoalisi.com> diakses pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 12.30 WIB

www.mesujikab.go.id, diakses pada tanggal 03 september 2018 pukul 13.00 WIB